

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Afiah, Ratna Nurul. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 1989
- Bruggink, J.J.H. *Refleksi Tentang Hukum Terj. Arief Sidharta*. Bandung. Citra Aditya Bakti, 1999
- Casey, Eoghan. *Digital Evidance and Computer Crime*. Maryland. Elsevier. 2011
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Cetakan Kedua*. Yogyakarta. Pustaka Belajar. 2013
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum. Disadur dari Hulsman, L.H.C. The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective*. Jakarta. CV Rajawali. 1984
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System A Social Science Perspective*. New York. Russell Sage Foundation. 1987
- Garner. Bryan. A (ed. In chief). *Black's Law Dictionary ninth edition*. Minnesota. Thomson Reuters. 2009
- Hadjon, Philipus M. dan Djatmiati, Tatiek Sri. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press. 2005
- Hadjon, Philipus M. Martosoewignjo, Sri Somantri. Basah, Sjahrhan, Manan, Bagir, Marzuki, Laica, Ten Berge, J.B.J.M. van Buuren, P.J.J. Stoink, F.A.M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Cetakan Keduabelas*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press. 2015
- Hamzah, Andi dan Surachman, RM. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta. Sinar Grafika. 1994

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta. Sinar Grafika. 2002
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua) Cetakan Kedua*. Jakarta. Sinar Grafika. 2001
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua) Cetakan Kesembilan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2007
- Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Cetakan Ketujuh. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. 2000
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana. 2007
- Minkenhof, A. *De Neerlandse Strafvordering. Vierde herziene druk*. Alphen Aan Den Rijn. H.D. Tjeenk Willink. 1981
- Nedzel, Nadia E. *Legal Reasoning, Research, and Writing for International Graduate Students*. New York. Aspen. 2008
- Osborn, Debra. Suppressing The Truth: Judicial Exclusion of Illegally Obtained Evidence in The United States, Canada, England, and Australia. *Murdoch University Electronic Journal of Law*. Vol. 7. Nr. 4. Perth. Murdoch University School of Law. 2000
- Packer, Herbert L. *The Limits of The Criminal Sanction*. California. Stanford University Press. 1968
- Pilli, Emmanuel S, Joshi, RC, dan Niyogi, Rajdeep. Network Forensic Frameworks. *Digital Investigation vol. 10*. Elsevier. 2010
- Prakoso, Djoko. *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Bina Aksara. 1987
- _____. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta. Liberti. 1988

- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia Cetakan Keduabelas*. Bandung. Sumur Bandung. 1985
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia). 1997
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia. 2007
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Pers. 1986
- Soesilo, R dan Karjadi, M. *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*. Bogor. Politeia. 1989
- Vaikar, Gajendra Kumar dan Gautam, Prateema. Data Mining Method Use in Crime Investigation Network CDR Analysis. *International Journal of Advances in Computer Science and Cloud Computing*. Volume 4 issue 1. 2016
- Walliman, Isidor. Tatsis, Nicholas Ch. Zito, George V. On Max Weber's Definition of Power dalam *Australia and New Zealand Journal of Sociology vol 13 issue 3*. Sage Journals. 1977
- Willassen, Svein Yngvar. Forensics and the GSM mobile telephone system. *International Journal of Digital Evidence*. Spring 2003 volume 2 Issue 1

Peraturan Perundang-undangan

- Nederland, *Het Nederlandsche Wetboek Van Strafvordering* 1921 sebagaimana telah beberapa kali diubah
- Republik Indonesia, *Het Herziene Indonesisch Reglement*
_____, Undang-undang Dasar 1945

Republik Indonesia, Undang-undang nomor 8 tahun 1976 tentang Pengesahaan
Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya

_____, Undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika

_____, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

_____, Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

_____, Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika

_____, Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

_____, Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia

_____, Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan
tindak pidana perdagangan orang

_____, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

_____, Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

_____, Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

_____, Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

_____, Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-
undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

_____, Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah nomor 92 tahun 2015

_____, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5
tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian
Negara Republik Indonesia

_____, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 21 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

_____, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah

_____, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

_____, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

_____, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 269Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis

_____, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

_____, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 11/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi

United Nations, The Universal Declaration of Human Rights 1948

_____, International Covenant on Civil and Political Rights 1966

_____, Single Convention on Narcotic Drugs tahun 1961 sebagaimana diubah tahun 1972

_____, Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988

United States of America, The Constitution of the United States

Online

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. *Buletin APJII Edisi 05 November 2016*.

Jakarta. APJII. 2016

<http://tekno.kompas.com/read/2017/08/10/14002367/telegram-bisa-diakses-kembali-di-indonesia-blokir-dicabut->

<https://metro.tempo.co/read/1037180/polisi-tangkap-4-pengedar-narkoba-jaringan-lapas-cipinang>

<http://showbiz.liputan6.com/read/2371756/kasus-narkoba-lagi-roby-geisha-dilaporkan-sopir-ojek-online>

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/03/11/o3vgh335-buwas-mengaku-tak-terpaku-pada-jumlah-personel-bnn>

<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/02/19074811/BNN.Kota.Depok.Kewalahan.karena.Kekurangan.Personel>